

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan manusia di bumi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya di jaman dulu cenderung mengalami proses yang sama, bagaimana ia berburu, meramu dan bercocok tanam. Demikian juga perilaku manusia di saat ini, mengalami kecenderungan ke arah yang sama, bagaimana mendapatkan Debituran, mempertahankan Debituran dan menyelesaikan Debituran.¹ kebutuhan manusia sangatlah beragam, sehingga secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya akan menimbulkan transaksi diantara keduanya untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya atau untuk memiliki sesuatu.¹

Dalam Islam terdapat jenis transaksi yang dihalalkan sehingga kita dapat mengambil manfaat dan ridha Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Transaksi tersebut antara lain adalah jual beli, simpan pinjam, dan ijarah (sewa). Dengan berjalannya transaksi tersebut dapat menuntaskan kemiskinan.² Islam menetapkan aturan komprehensif dalam bidang ekonomi, yaitu tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan itu merupakan rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm.1

² Dina Aprilia, *Metode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, hlm.3

sekaligus pengalokasian dan pembelanjaannya.

Selama ini orang muslim mendambakan lembaga jasa keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini maka lahirlah Lembaga Keuangan Syariah (BMT Tumang Cabang Delanggu). Lembaga Keuangan Syariah (BMT Tumang Cabang Delanggu) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (BMT Tumang Cabang Delanggu) dibedakan menjadi dua macam yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan³ diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan menyalurkan kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.

Adapun yang termasuk pada Lembaga Keuangan Non Bank diantaranya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dari beberapa bentuk Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang telah disebutkan sebelumnya yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Lembaga ini sangat berperan seiring dengan kegiatan umat Islam untuk berekonomi secara Islami dan memberikan solusi terhadap problematika bisnis perekonomian secara elegan dan profesional sehingga dapat meringankan beban ekonomi

³ Surat Keputusan Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 Tentang Lembaga Keuangan

masyarakat terutama pada kalangan masyarakat menengah ke bawah.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya dengan menggunakan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Lembaga ini ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi syariah. Secara legal formal BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi dan secara operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah. Kehadiran BMT adalah untuk membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah yang tidak terjangkau oleh bank.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi bagi hasil, sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan sewa menyewa jasa. Transaksi bagi hasil di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dilakukan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah.

Pemberian pembiayaan pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) harus didasarkan pada suatu kepercayaan bahwa bank sebagai penyalur pembiayaan harus percaya kepada pihak penerima pembiayaan akan mengembalikan apa

yang sudah diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam penyaluran pembiayaannya kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam Undang-undang Perbankan Syariah⁴ pemberian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk muḍārabah dan musyārakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bītamlīk.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murābahah, salam, dan istiṣnāʿ.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qarḍ.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

BMT Tumang Cabang Delanggu merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan produk pembiayaan multijasa. Hal ini merupakan bentuk pelayanan bank untuk memenuhi permintaan mu'ajjir dalam hal kebutuhan jasa. Menurut Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, bahwa pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz), dan akad yang digunakan adalah ijarah dan kafalah. Pembiayaan ini digunakan dalam bentuk penyaluran pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji, kepariwisataan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan multijasa

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah

ini, bank syariah memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee yang harus disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase⁵.

Pengertian ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad (imbalan), dari sinilah pahala dinamai juga al-ajru (upah). Sedangkan secara istilah, ijarah berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan⁶ imbalan. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, bahwa ijarah berarti akad suatu manfaat dengan imbalan⁷. Sedangkan pengertian ijarah menurut ulama Syafiiyah ialah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu⁸.

Menurut Fatwa DSN-MUI⁹ ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Karena itu, ijarah dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain.

Pelaksanaan akad ijarah dalam perbankan syariah harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak lembaga keuangan (BMT) selaku penyedia dana dan penyewa. Dimana BMT wajib menyediakan dana untuk merealisasikan

⁵ Dewan Syariah Nasional. 2014., Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga, hlm. 253

⁶ Sayyid Sabiq, 1971. Fiqh Sunnah. Beirut: Dar Kital al-Arabi, hlm. 177

⁷ Yadi Janwari. 2015. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 88

⁸ Nasrun Haroen. 2000. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. hlm. 228.

⁹ Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

penyediaan objek sewa yang dipesan mu'ajjir; pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun dibayar sekaligus; dan pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang¹⁰.

Objek yang disewa dapat berupa manfaat dari barang yang disewa maupun manfaat dari jasa dan upah, seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh anggota, atau jasa yang merupakan produk perbankan yang kepemilikannya dan pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan tersebut seperti pelayanan jasa untuk membayar ongkos uang sekolah/ kuliah, tenaga kerja, hotel, angkut dan transportasi dan sebagainya, BMT mendapat imbalan sewa jasa (ujrah) tersebut.

Menurut Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IXI/2007, pembiayaan multijasa dapat menggunakan akad ijarah atau kafalah. Di BMT Tumang Cabang Delanggu dalam pembiayaan multijasa lebih sering menggunakan akad ijarah. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad ijarah yang terjadi di BMT Tumang Cabang Delanggu, maka penulis melakukan wawancara pendahuluan dengan Administrasi Pembiayaan BMT Tumang Cabang Delanggu diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa di BMT Tumang Cabang Delanggu yaitu dimulai dengan anggota (mu'ajjir) mengajukan pembiayaan yang dibutuhkan ke BMT (musta'jir). Setelah dicapai kesepakatan antara anggota dengan BMT, maka akad pembiayaan ditanda tangani. Pihak BMT dapat mencairkan langsung dananya kepada anggota atau mentransfer dananya ke rekening anggota untuk digunakan sesuai kebutuhannya seperti biaya pendidikan, atau biaya kesehatan

¹⁰ Yadi Janwari. 2015. Lembaga Keuangan Syari'ah. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 101

seperti biaya persalinan dan rawat inap untuk dibayarkan kepada instansi terkait yakni sekolah atau rumah sakit.

Selanjutnya anggota akan melunasi hutangnya kepada BMT dengan cara mengangsur tiap bulan atau dengan sistem tempo dengan biaya tambahan dari harga awal pinjaman sebagai upah/ imbalan (ujrah) yang didapat oleh BMT Tumang Cabang Delanggu”.

Dari keterangan wawancara pendahuluan di atas, terlihat bahwa BMT Tumang Cabang Delanggu hanya menyerahkan dana untuk pembayaran sepenuhnya kepada anggota sehingga BMT Tumang Cabang Delanggu tidak bekerjasama secara langsung dengan penyedia jasa, seperti sekolah, rumah sakit, klinik, agen perjalanan dan sebagainya serta objek sewa dari akad ijarah bukan merupakan sewa manfaat atau sewa produk jasa, melainkan BMT Amanah hanya memfasilitasi anggota dengan sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

Dari beberapa permasalahan di atas, penulis melihat adanya perbedaan teori dengan praktik akad ijarah yang terjadi di BMT Tumang Cabang Delanggu. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad ijarah pada pembiayaan multijasa. Penulis memilih judul skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Tumang Cabang Delanggu)”.

B . Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menetapkan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana penerapan akad Ijarah Multijasa di BMT Tumang Cabang Delanggu?
- B. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam akad Ijarah Multijasa di BMT Tumang Cabang Delanggu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan akad Ijarah Multijasa BMT Tumang Cabang Delanggu.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam akad Ijarah Multijasa di BMT Tumang Cabang Delanggu

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan pada perbankan syariah akibat hukum yang timbul.

2. Bagi Ilmu Hukum

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya pembiayaan

multi jasa ijarah

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para masyarakat yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang pada kesempatan lain mempunyai minat untuk mengkaji permasalahan yang sejenis.

E. Kerangka Pikir

1. Konstruksi Hubungan Hukum antara Debitur dengan BMT Tumang Cabang Delanggu.

Pengertian *ijarah* dan akan *ijarah* berdasarkan DSN-MUI No. 101/DSN-MUI/X/2016 adalah sebagai berikut:

- a. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan/ atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*);
- b. Akad *Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat '*ain*') dan/ atau jasa (*;amal*) yang pada saat akad hanya disebut sifat-sifat dan spesifikasinya (kualitas dan kuantitas)

a. Subjek Hukum

Pihak-pihak yang terkait dalam Perjanjian Ijarah Multijasa adalah¹¹:

- 1) *Mu'jir* pemberi sewa adalah pihak yang menyewakan barang baik *mu'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Dalam

¹¹ DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Ketentuan Pertama No. 2-4

penelitian yang disebut sebagai *mu'jir* dapat leasing (dealer motor/ atau toko) maupun BMT Tumang Cabang Delanggu sendiri.

- 2) *Musta'jir* adalah pihak penyewa (penyewa/ penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-a yan* atau penerima jasa dalam akad *ijarah 'ala al-a mal/ ijarah 'ala al asyakhsh*, baik *musta'jir* berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang dalam penelitian ini disebut sebagai debitur.
- 3) *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah 'ala al a'mal/ ijarah 'ala al-asykhsh* baik *ajir* berupa orang, maupun yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

b. Objek Hukum

Objek Perjanjian dalam perjanjian ijarah adalah debitur yang meminjam sejumlah dana/ uang pada BMT Tumang Cabang Delanggu dengan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/ DSN_MUI/IX/ 2017, yang dimaksud dengan akad ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun manfaat jasa. Lebih lanjut lagi dalam Fatwa DSN-MUI No. 112/ DSN_MUI/IX/ 2017, disebutkan juga bahwa ijarah multi jasa adalah

akad ijarah yang adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.

Syarat perjanjian sebagai mana yang tercantum dalam DSN-MUI disebut sebagai berikut:

- 1) Akad *ijarah* boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) *Mua'jir*, *musta'jir* dan *ajir*, cakap hukum sesuai dengan syariah, dan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) *Mua'jir* wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad ijarah baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah*, maupun *niyabiyyah*;
- 4) *Mua'jir* wajib memiliki kemampuan menyerahkan manfaat;
- 5) *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan membayar *ujrah*;
- 6) *Ajir* memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang

bertentangan dengan kerangka tertentu¹². Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan perlukan atau dipakai sebagai materi melalui beberapa cara, yaitu seperti berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti. Dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap penemuan hukum *in-concreto*.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu masalah yang terkait akad Ijarah Multijasa dalam skema pembiayaan multi jaspada BMT Tumang Cabang Delanggu

¹² Bambang, Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 2.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal, sehingga sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer dan berfungsi untuk melengkapi data-data yang ada dengan mengumpulkan data-data dengan membaca, mempelajari dan mencatat buku-buku literatur dan tulisan tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti¹³

Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 2008 Tentang perbankan Syariah
- 2) DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/2000, tentang Pembiayaan Ijarah
- 3) DSN-MUI No. 101/ DSN_MUI/X/ 2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah
- 4) DSN-MUI No. 112/ DSN_MUI/IX/ 2017 tentang Akad Ijarah
- 5) Yurisprudensi

b) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- 1) Jurnal ilmiah baik lokal maupun internasional

¹³ Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press. Hal, 99.

- 2) Kepustakaan/buku literatur yang berhubungan dengan hukum jaminan dan hukum perbankan
 - 3) Data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana dan hukum perbankan
 - 4) Referensi-referensi yang relevan dengan hukum jaminan dan hukum perbankan
- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan cara menggunakan penelitian studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara mencari, mempelajari, dan menginventarisasi, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dan berhubungan dengan objek yang dikaji.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan

inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analisis doktrinal, dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa penemuan hukum *in-concerto*.

Pada pembahasan tahap kedua ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, dimana:

- a. Peraturan perundang-undangan lain yang ada (disamping juga doktrin dan teori hukum), dijadikan sebagai premis mayornya,
- b. Data sekunder yang lain serta data primer yang terkait, sebagai premis minornya,
- c. Konklusi akan diambil dengan cara membandingkan data sekunder yang ada dan yang sudah diolah dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin dan teori hukum yang ada, sehingga pada tahap akhirnya akan ditemukan hukum *in-concertonya*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan dan hasil penelitian serta pembahasannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN